

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AMAL USAHA  
DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI PIMPINAN DAERAH  
MUHAMMADIYAH KOTA MATARAM**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh :

**GUFRA N GUNADI  
NIM. 21711056**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI KEBIJAKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AMAL USAHA  
DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI PIMPINAN DAERAH  
MUHAMMADIYAH KOTA MATARAM**

Oleh:

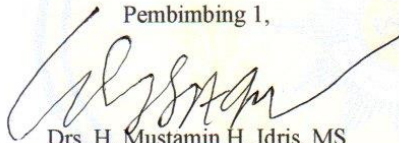
**GUFAN GUNADI**

**NIM. 217110056**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penelitian dan penyusunan skripsi pada  
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

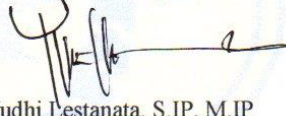
**Telah Mendapat Persetujuan Pada Tanggal, Februari 2022**

Pembimbing 1,



Drs. H. Mustamin H. Idris, MS  
NIDN. 0031126484

Pembimbing 2,



Yudhi Lestana, S.IP, M.IP  
NIDN. 0827118801

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP  
NIDN. 0822048901

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AMAL USAHA  
DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI PIMPINAN DAERAH  
MUHAMMADIYAH KOTA MATARAM**

Oleh:  
**GUFRAH GUNADI**  
**NIM. 217110056**

Naskahskripsi ini telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian yang  
diselenggarakan :  
Mataram, Februari 2022

Dinyatakan Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Ujian Mem peroleh  
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) Diprogram Studi Administrai Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram

Tim Penguji

**Drs. Mustamin H. Idris, MS**  
**NIDN. 0031126484**

(PU) 

**Yudhi Lestanata, S.IP.,M.IP**  
**NIDN. 0827118801**

(PP) 

**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
**NIDN. 0806066801**

(PN) 

Mengetahui  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan

  
**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
**NIDN. 0806066801**

## PERNYATAAN ORISINALITA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gufran Gunadi

NIM : 217110056

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik, baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun diperguruan tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dan daftar pustaka. Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 Ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 07 Februari 2021





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GUFRAN GUNADI  
NIM : 217110056  
Tempat/Tgl Lahir : BIMA, 08 AGUSTUS 1996  
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp : 0895 076 1300  
Email : [gufan.gunadi@gmail.com](mailto:gufan.gunadi@gmail.com)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AMAL USAHA  
DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI PIMPINAN DAERAH  
MUHAMMADIYAH KOTA MATARAM

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 10 MARET 2022

Penulis



GUFRAN GUNADI  
NIM. 217110056

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GUFRAN GUNADI  
NIM : 217110056  
Tempat/Tgl Lahir : BIMA, 08 AGUSTUS 1996  
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp/Email : 0895 0976 1300 / gufrangunadi.08@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

IMPLEMENTASI KEBIJARAN PENGEMBANGAN AMAL USAHA  
DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI PIMPINAN DAERAH  
MUHAMMADIYAH KOTA MATARAM

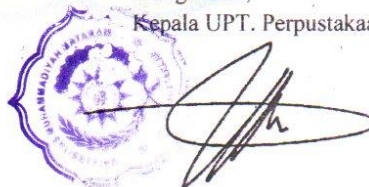
Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 10 MARET .....2022  
Penulis



GUFRAN GUNADI  
NIM. 217110056

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904



**MOTTO**

**“JANGAN MENYERAH BAGAIMANAPUN KONDISI MU,  
INGAT ALLAH SWT AKAN SELALU MEMBANTU MU”**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua ku, kepada Almarhum ayahanda ku tercinta Awaludin dan Ibunda ku tercinta Maryam yang telah tulus dan ikhlas membesarkan ku, mendukung dan mendoakan anakmu ini, yang selalu mengajarkan arti kesabaran dalam menjalani kehidupan dan sebagai motivator utama ku dalam menjalani kehidupan dan menyelesaikan semua masalah sehingga aku bisa bangkit dari keterpurukan. Untuk ayahanda ku bapak Awaludin semoga engkau tenang di surga di ampuni dosa-dosa engkau selama hidup di dunia, dilapangkan kuburan engkau dan dijauhkan dari siksa neraka, dan untuk Ibunda Ku tercinta Ibu Maryam semoga engkau sehat selalu dan bisa merasakan kesuksesan anak mu yang bisa meraih gelar dengan doa dan dukungan mu. Terima kasih sebanyak-banyak untuk kalian berdua walaupun belum banyak yang bisa anak mu berikan untuk kalian berdua. Semoga Allah SWT memuliakan kelian berdua baik di dunia maupun di akhirat.
2. Kepada saudara saudari ku, terima kasih atas semua dukungan kalian selama ini.
3. Untuk sahabat, kawan, dan teman-teman ku yang sudah mendukung dan membantu dalam proses perkuliahan.
4. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga untuk saya.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tanggung jawab untuk menyelesaikan proposal skripsi saya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Amal Usaha Bidang Pendidikan Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Mataram”. Penyusunan proposal skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Terselesainya penulisan proposal skripsi ini tidak lain berkat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, tanpa adanya dukungan dan motivasi dari mereka, mungkin penulis tidak bisa menyelesaikan proposal skripsi ini tepat waktu. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan serta penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Drs. H. Mustamin H. Idris, MS selaku pembimbing utama dalam penulisan proposal skripsi ini.

5. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP, M.IP selaku pembimbing pendamping dalam penulisan proposal skripsi ini.
6. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk dalam penulisan proposal skripsi ini baik secara bahasa, penulisan dan materinya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan kata-katanya yang kurang dalam penulisan proposal skripsi ini penulis mohon dimaafkan dan kritik serta saran yang sifatnya membangun. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca untuk menambah pengetahuan dan referensi.

Mataram,.....2022

Penulis

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AMAL USAHA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA MATARAM**

Gufan Gunadi<sup>1</sup>, Yudhi Lestanata<sup>2</sup>, Mustamin H. Idris<sup>3</sup>  
Mahasiswa<sup>1</sup>, Pembimbing<sup>2</sup>, Pembimbing Utama<sup>3</sup>  
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

## **ABSTRAK**

Pendidikan yang terus menerus berkembang memaksa Muhammadiyah untuk melakukan sebuah inovasi untuk mempertahankan eksistensi amal usaha di bidang pendidikan, sehingga dalam mempertahankan eksistensi tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan dalam mengelola amal usaha bidang pendidikan tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Mataram dalam pengembangan amal usaha dalam bidang pendidikan, serta apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Mataram dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dari penelitian yang sudah dilakukan, dari berbagai amal usaha yang ada dibawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Mataram SMA Muhammadiyah Mataram diambil sebagai sampel dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara observasi, dokumentasi dan triangulasi. Mode analisa yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengikuti format penelitian yang telah di susun dan strategi untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya di lapangan, dengan peran teori sebagai alat analisis.

Setelah dilakukan analisis data, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Mataram yaitu sebagai pembina dan komite sekolah yang dibawah naungannya tanpa tekecuali sehingga kemajuan sekolah terletak pada sinergi antara sekolah dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Mataram. Dalam hambatan implemementasi kebijakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah mengalami kendala yang begitu banyak baik dari kondisi sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik, komunikasi antara birokrasi yang belum maksimal serta sumber daya yang masih kurang dalam menunjang kegiatan implementasi kebijakan.

***Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Muhammadiyah, Pendidikan***

**THE BUSINESS CHARITY DEVELOPMENT POLICY OF EDUCATION  
FIELD IN REGIONAL LEADERSHIP OF MUHAMMADIYAH  
MATARAM**

Gufran Gunadi<sup>1</sup>, Yudhi Lestanata<sup>2</sup>, Mustamin H. Idris<sup>3</sup>  
Student<sup>1</sup>, Supervisor<sup>2</sup>, Principal Advisor<sup>3</sup>

Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences  
Muhammadiyah University of Mataram

**ABSTRACT**

The development of education causes Muhammadiyah to innovate in order to sustain the existence of business charities in the field of education, which cannot be separated from various policies in managing business charities in the field of education. The goal of this study is to determine how the Muhammadiyah Regional Leadership in Mataram City implements its policies in the development of business charities in the field of education, as well as the barriers that the Muhammadiyah Regional Leadership in Mataram City faces in doing so. Various corporate charities under the aegis of the Regional Leadership of Muhammadiyah Mataram City, in this case, SMA Muhammadiyah Mataram was used as samples in this study based on the findings of the investigation. Interview, observation, documentation, and triangulation were used as data gathering approaches. The analysis mode utilized was descriptive qualitative, with the role of theory as an analytical tool, and it followed the study format that had been prepared as well as techniques to collect as much data as possible in the field.

After analyzing the data, the findings of this study show that the Muhammadiyah Regional Leadership in Mataram City implements its policies as a coach and school committee under its auspices without exception, resulting in the school's progress being dependent on the synergy between the school and the Muhammadiyah Regional Leadership of Mataram City. Muhammadiyah Regional Leaders have numerous challenges in implementing policies, including a shortage of student in schools, ineffective bureaucratic communication, and a lack of resources to assist policy implementation initiatives.

**Keywords:** *Policy Implementation, Muhammadiyah, Education*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Implementasi Kebijakan .....	9
B. Konsep Implementasi Kebijakan .....	12
C. Model implementasi Kebijakan .....	15
D. Definisi Kebijakan Pendidikan.....	21
E. Strategi Implementasi Kebijakan Pendidikan .....	24
F. Mutu Pendidikan .....	27
G. Faktor Pengembangan Mutu Pendidikan .....	29

H. Kerangka Berpikir .....	30
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	31
C. Pemilihan Informan .....	31
D. Sumber dan Jenis Data .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Teknik Analisa Data .....	33
G. Uji Validitas Data .....	34
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
B. Aspek Pengembangan Mutu Pendidikan .....	44
C. Faktor Implementasi Kebijakan PDM Kota Mataram .....	51
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. KESIMPULAN .....	65
B. SARAN .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

1. Keadaan Siswa SMA Muhammadiyah Mataram 3 tahun terakhir.....	6
2. Jumlah Perkembangan Peserta Didik Dari Tahun 2015-2019.....	40
3. Data Ruang Penunjang Akademik & Non Akademik.....	41
4. Jumlah Guru dengan Tugas Mengajar Sesuai Pendidikan.....	42
5. Tenaga Kependidikan/Tenaga Pendukung.....	43
6. Daftar Guru Dengan Pendidikan Terakhir.....	48
7. Daftar Tenaga Pendidik Dilihat Dari Status Kepegawaian.....	51
8. Jadwal Pengajian Ahad Pagi PDM Kota Mataram.....	62
9. Jumlah Data Kepegawaian SMA Muhammadiyah Mataram.....	64
10. Tata Tertib Guru SMA Muhammadiyah Mataram.....	72

## DAFTAR GAMBAR

1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III.....	21
2. Struktur Organisasi SMA Muhammadiyah Mataram.....	44
3. Struktur Organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Mataram.....	59

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian kesadaran, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Ali, 2018; 2)

Peningkatan mutu pendidikan selalu menjadi bahan inti dalam pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional. Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari penerapan kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk dengan sistematis yang lengkap dan terarah. Tanpa penerapan kebijakan tersebut arah dari perkembangan pendidikan tidak dapat terjamin dan berpengaruh besar terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Dalam proses pendidikan, potensi dasar seseorang merupakan muatan pendidikan yang dipupuk dan dikembangkan dalam kehidupan seseorang dan sepanjang hayatnya, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat luas (Anwar, 2017: 80).memperoleh pengetahuan yang dijiwai oleh nilai-nilai kebenaran, baik yang bersifat abstrak, teoritis, maupun praktis. Nilai riil ini selanjutnya mendorong terbentuknya sikap perilaku yang arif dan bijaksana. Selanjutnya melalui sikap dan perilaku tersebut, manusia membangun budaya dan peradabannya. Kebudayaan, baik material maupun spiritual, adalah usaha manusia untuk berubah dan



mentransformasikan buat koneksi iman vertikal dan horizontal. Suparlan (Hermawan, 2012: 49)

Muhammadiyah salah satu organisasi masyarakat Islam yang menjadikan bidang pendidikan sebagai salah satu tempat menjalankan dakwah amal ma'aruf nahi munkar. Seperti yang diungkapkan oleh Mulkan (Nashir, 2016: 126) gagasan dasar pendidikan Kyai Ahmad Dahlan terletak pada konsepnya tentang kesempurnaan budi yang luhur karena mengerti baik-buruk, benar-salah, kebahagiaan atau penderitaan, dan bertindak berdasarkan pengertian itu. Dengan beribu amal usaha dalam bidang pendidikan yang telah didirikan oleh Muhammadiyah, semua itu tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), tepatnya dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 3 yang berbunyi, usaha Muhammadiyah yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan meliputi: 1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. 2. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya. 3. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, shadaqah, hibah, dan amal shalih lainnya. 4. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia. 5. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian. 6. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan

hidup yang berkualitas 7. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 8. Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumberdaya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan. 9. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri. 10. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 11. Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan. 12. Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk mensukseskan gerakan. 13. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat. 14. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah.

Muhammadiyah kaya akan dengan amal usaha dibidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, kini amal usaha Muhammadiyah memerlukan revitalisasi atau penguatan kembali, bahkan memerlukan pembaruan (Nashir, 2016:418). Dengan didirikannya berbagai lembaga pendidikan oleh Muhammadiyah, perlu adanya lembaga-lembaga yang dapat membantu pengelolaan dalam pengembangan amal usaha. Salah satunya lembaga atau Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), adapun tugas dari Majelis Dikdasmen ini tertera dalam Peraturan PP Muhammadiyah Nomor 03/PRN/I.0/B/2012 Pasal 4 ayat (1) yaitu;

- a) Pembinaan ideologi Muhammadiyah di sekolah, madrasah, dan pondok pesantren.

- b) Perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, pengoordinasian, dan pengawasan atas pengelolaan amal usaha, program, dan kegiatan.
- c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
- d) Pengembangan kualitas dan kuantitas amal usaha, program dan kegiatan.
- e) Pengembangan sekolah, madrasah, dan pondok pesantren.
- f) Penelitian dan pengembangan bidang pendidikan dasar dan menengah.
- g) Penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang pendidikan dasar dan menengah.

Satu hal yang perlu dicermati adalah, sejauh mana kebijakan pendidikan yang disekenggarakan Muhammadiyah itu telah ditujukan pada semangat pembaruan yang telah dicita-citakan. Sebab dalam kurun waktu terakhir, gerakan pendidikan Muhammadiyah seakan-akan telah bergeser, untuk tidak dikatakan kelaur, dari garis perjuangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Studi *World Bank* dalam (Ali, 2017: 10), menemukan empat masalah mendasar yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia. Pertama, sistem organisasi dan manajemen pendidikan sangat kompleks; kedua, manajemen yang bersifat sentralistik terutama yang berkaitan dengan penentuan program, perencanaan dan pembiayaan; ketiga, sistem penganggaran yang terfragmentasi dalam berbagai kategori. Keempat, manajemen sekolah tidak efektif.

Dalam memahami proses kebijakan, terdapat aspek yang sangat penting yaitu implementasi kebijakan. Tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan adalah pada tahap implementasi. Implementasi kebijakan lebih bersifat kegiatan praktis,

termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan disebut sebagai serangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah kebijakan ditetapkan, baik yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis, maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, untuk mencapai sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Tingkat keberhasilan proses ini dipengaruhi oleh berbagai unsur, baik yang bersifat mendukung atau menghambat, serta lingkungan baik fisik, sosial maupun budaya. Hal yang perlu diwaspadai adalah dalam memilih alternatif untuk memecahkan masalah, sehingga tidak mengganggu pencapaian tujuan kebijakan. (Ali, 2017: 23). Begitupun Indrawan (2015: 2) mengungkapkan manajemen pendidikan sebagai pengatur berbagai sumber daya pendidikan yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Oleh karena itu manajemen dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh institusi yang terkait tersebut menjadi proses yang penting untuk mencapai pengembangan pendidikan

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Mataram salah satu dari struktur pimpinan Muhammadiyah yang berada di tingkat daerah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau disingkat PDM Kota Mataram memiliki amal usaha di bawah naungan mereka khususnya dalam bidang pendidikan salah satunya SMA Muhammadiyah Mataram. Dalam proses pengembangan sekolah ini banyak mengalami kendala yang perlu dibenahi dan diperhatikan para pejabat berkepentingan yang ada di persyarikatan Muhammadiyah salah satu contoh menurunnya perkembangan pendidikan Muhammadiyah bisa di lihat dari data

jumlah peserta didik dari tahun ke tahun yang mengalami penurunan yang sangat signifikan, diantaranya:

**Tabel. 1 Keadaan Siswa SMA Muhammadiyah Mataram 3 tahun terakhir**

NO	Tahun Ajaran	Jumlah Siswa
1	2017/2018 GANJIL	130
2	2017/2018 GENAP	124
3	2018/2019 GANJIL	109
4	2018/2019 GENAP	110
5	2019/2020 GANJIL	96
6	2019/2020 GENAP	102

Sumber: <https://dapo.kemdikbud.go.id>

Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pendidikan Muhammadiyah dalam penerimaan siswa baru mengalami kemunduran atau pun bisa disebut tertinggal dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Mataram. Padahal sekolah Muhammadiyah tidak kalah bagus dan tidak kalah berkualitas dengan sekolah negeri-negeri yang lain. Akan tetapi di lapangan sungguh bertolak belakang dengan pemikiran sederhana kita.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mencoba untuk membahas dan mengkaji permasalahan dalam bentuk proposal yang berjudul **”Implementasi Kebijakan Pengembangan Amal Usaha Bidang Pendidikan Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Mataram”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Mataram dalam pengembangan amal usaha dalam bidang pendidikan?
2. Apa saja hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Mataram dalam pengembangan amal usaha pendidikan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Mataram dalam pengembangan amal usaha bidang pendidikan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi kebijakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Mataram dalam pengembangan amal usaha bidang pendidikan.

## **D. Manfaat Penelitian**

a. Secara teoritis

- 1). Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah penelitian terutama dalam memberikan informasi tentang perkembangan pendidikan Muhammadiyah di kota Mataram. Dan dapat dijadikan rujukan serta reeferensi untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pendidikan Muhammadiyah.
- 2). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada akademik terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pengembangan pendidikan Islam.

b. Secara praktis

1). Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi pedoman khususnya dalam kajian Muhammadiyah sebagai lembaga pendidikan di kota Mataram. Dan meningkatkan kuantitas sumber referensi bagi penelitian selanjutnya

2). Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi para peneliti yang akan datang, khususnya yang akan mengkaji sejarah gerakan pendidikan Muhammadiyah.



## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini bukanlah yang pertama kali dilakukan. Penulis juga melakukan kajian pustaka yang sekiranya relevan dengan judul yang sedang penulis kerjakan. Kajian atau telaah pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi (Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 75). Adapun hasil penelitian yang ada relevansinya dengan judul yang penulis angkat yaitu:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Saifulloh dkk dalam Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.2, November 2012 tentang “Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah” hasil penelitian ini yaitu Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah telah diupayakan melalui berbagai kegiatan penataran, seminar, pendidikan pelatihan ataupun workshop. Melalui berbagai kegiatan tersebut dikenalkan pada inovasi-inovasi pembelajaran, karena inovasi adalah sebagai suatu kebutuhan. Pengembangan bahan ajar, pengembangan strategi dan metode pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, sistem penilaian, evaluasi, dan esesmen telah menjadi menu utama dunia pendidikan, tetapi dari pengalaman empirik tampaknya upaya-upaya itu belum secara signifikan membawa perubahan dalam arti peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Oleh karenanya yang harus dilakukan adalah perbaikan yang berkesinambungan berkaitan dengan komitmen (Continuous quality Improvement) dan proses Continuous pross Improvement. Komitmen terhadap kualitas dimulai



dengan pernyataan dedikasi pada misi dan visi bersama, serta pembedayaan semua persiapan untuk secara inkremental mewujudkan visi tersebut. Perbaikan yang berkesinambungan tergantung kepada dua unsur. Pertama, mempelajari proses, alat, dan keterampilan yang tepat. Kedua, menerapkan keterampilan baru small achievable project. Proses perbaikan berkesinambungan yang dapat dilakukan berdasarkan siklus Action. Siklus ini merupakan siklus perbaikan yang never ending, dan berlaku pada semua fase organisasi/lembaga, khususnya lembaga pendidikan

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Solichin dalam Jurnal Studi Islam Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015 tentang “Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi” peneliti memberikan kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan dan peran birokrasi di bidang pendidikan dibutuhkan birokrasi pendidikan yang mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan memahami kebutuhan masyarakat yang dilayani. Kinerja birokrasi melalui responabilitas harus terus ditingkatkan untuk menciptakan pelayanan prima terutama merespon kepentingan publik. Lembaga pendidikan membutuhkan penghargaan dan perlakuan humanis ketimbang dijadikan sasaran eksploitasi dan kepentingan politis etis semata yang menegasikan tujuan utama dari pendidikan itu sendiri. Peran birokrasi di lembaga sekolah pada akhirnya menjadi puncak model implementasi kebijakan pada satuan dan jenjang pendidikan. Di sini diperlukan adanya pembaharuan manajemen pada satuan dan jenjang pendidikan tersebut. Proses pembaharuan atau inovasi manajemen menjadi suatu keniscayaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi. Problem-

problem tersebut dapat berupa usaha pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan efisiensi dan efektifitas pendidikan serta relevansi pendidikan. Tujuannya agar supaya penyebaran ide-ide inovasi yang dilakukan bisa diadopsi, dimanfaatkan dan didesiminasikan untuk perbaikan dan pemecahan problematika pendidikan di Indonesia

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nurdin Kholili dan Syarief Fajaruddin dalam Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 8, No. 1, April 2020 (53-69) tentang “Manajemen strategik peningkatan mutu lembaga pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Gunungkidul” hasil dari penelitian tersebut Implementasi manajemen strategik dalam usaha peningkatan mutu pendidikan di Gunungkidul dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder dalam setiap tahapan manajemen strategik. Dalam merumuskan strategi (formulating), mengimplementasikan strategi (implementating) dan mengevaluasi strategi (evaluating), semua unsur lembaga pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Gunungkidul harus terlibat di dalamnya, karena dengan adanya keterlibatan semua stakeholder akan mempermudah dalam meningkatkan dan mewujudkan lembaga pendidikan Muhammadiyah yang bermutu dan kompetitif. Adapun implementasi strategi yang dilakukan dalam meningkatkan mutu sekolah adalah dengan menjabarkan dan melaksanakan semua strategi yang telah dirumuskan dalam bentuk kegiatan-kegiatan terprogram dan terukur. Tahapan terakhir implementasi ini dilakukan evaluasi strategi yang digunakan adalah melalui rapat formal maupun informal. Selain itu, ada beberapa strategi yang harus menjadi perhatian khusus lembaga pendidikan Muhammadiyah di

Kabupaten Gunungkidul, yaitu pengembangan kurikulum, peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana, peningkatan prestasi peserta didik dan membangun citra lembaga. Keberadaan sumber daya manusia yang masih muda dan berkualitas juga ditopang dengan anggaran biaya yang cukup besar dipastikan dapat membantu mewujudkan lembaga pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Gunungkidul yang bermutu.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Yansen Fitra (14210250) tentang Peran Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Dalam Pengembangan Sekolah Menengah Atas (Sma) Muhammadiyah 1 Mataram. Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa Peran Majelis DIKDASMEN Muhammadiyah dalam Pengembangan SMA Muhammadiyah Mataram a. Majelis DIKDASMEN sebagai pembina sekolah 1) Memimpin dan membantu SMA Muhammadiyah 1 dalam usaha pengembangan sekolah. 2) Membantu dan mengkoordinasi usaha/kegiatan SMA Muhammadiyah 1 yang sesuai dengan maksud tujuan persyarikatan. 3) Membantu sekolah mengadakan pendidikan untuk: Membentuk tenaga-tenaga pendidik dan pengajar yang berjiwa Muhammadiyah. 4) Mempertebal keyakinan agama dan kesadaran Muhammadiyah kepada tenaga pendidik dan pengajar SMA Muhammadiyah 1. 5) Mempertinggi mutu dan kecerdasan tenaga pendidik dan pengajar. 6) Mengusahakan kelengkapan alat-alat pengajaran dan pendidikan serta alat-alat administrasi sekolah.

## **B. Konsep Implementasi Kebijakan**

Konsep implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan sesuatu cara ataupun metode dalam suatu kebijakan buat bisa menggapai tujuannya. Buat

mengimplementasikan kebijakan publik, terdapat 2 opsi tata cara ataupun langkah yang butuh dicermati, ialah langsung mengimplementasikan dalam wujud program ataupun lewat perumusan kebijakan ataupun turunan dari kebijakan public tersebut (Nugroho, 2011: 618). Demikian halnya dengan dengan kebijakan publik yang pastinya memiliki tujuan tertentu pula, ialah mengendalikan serta mengelola kehidupan bersama baik dalam organisasi ataupun kehidupan bermasyarakat serta buat menggapai tujuan baik misi serta visi bersama yang sudah disepakati.

Implementasi kebijakan ialah salah satu tahapan yang sangat berarti dalam totalitas struktur kebijakan, sebab lewat prosedur ini proses kebijakan secara totalitas bisa dipengaruhi tingkat keberhasilannya ataupun tidak adanya pencapaian tujuan. Bagi Chief J.O. Udoji (Agustino, 2008: 140) berkata kalau “penerapan kebijakan merupakan sesuatu yang berarti apalagi bisa jadi jauh lebih berarti dari pada pembuat kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya berbentuk impian ataupun rencana bagus yang tersimpan apik dalam arsip jika tidak direalisasikan sebagaimana yang telah dibentuk”.

Di dalam karangan Wahab (2008: 65) menjabarkan bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu sebetulnya tidak cuma menyangkut sikap pelaku administratif yang bertanggung jawab buat melakukan program serta memunculkan kepatuhan pada diri kelompok atau organisasi sasaran, melainkan pula menyangkut ekonomi, jaringan politik serta sosial yang langsung ataupun tidak langsung bisa mempengaruhi terhadap apa yang di cita-citakan.

Public policy yang kerap disamakan dengan kebijakan publik, dalam khasanah ilmu administrasi publik dimaknai secara bermacam-macam bagi Harold Lasswell dalam Wibowo (2004: 45), kebijakan publik merupakan “serangkaian program perencanaan yang meliputi tujuan, nilai, serta aplikasi”, sebaliknya bagi Austein Renney dalam Wibowo (2004: 45) kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang sudah ditetapkan ataupun statmen menimpa sesuatu kehendak.

Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R . Dye yang berkata kalau kebijakan publik merupakan apapun pula yang diseleksi oleh pemerintah buat dicoba serta tidak dicoba, (*whatever goverment choose to do or not to do*). Sesi implementasi pula ialah sesuatu proses yang begitu lingkungan apalagi tidak sering bermuatan politis dengan terdapatnya intervensibermacam kepentingan. Buat melukiskan kerumitan ini bisa dilihat statment Bardach (Agustino. 2008: 138) selaku berikut “merupakan lumayan buat membuat suatu program serta kebijakan universal yang kelihatannya bagus di atas kertas lebih susah lagi merumuskan didalam perkataan serta selogan-selogan yang kelihatannya mengenakan untuk kuping para pemimpin serta para pemilih yang mendengarkannya. Serta lebih susah lagi buat melaksanakannya dalam wujud metode yang memuaskan seluruh orang tercantun mereka anggap kelien”.

Bagi Daniel Mazmanian serta Paul Sabatier didalam buku dasar-dasar kebijakan publik karanganLeo Agustino (2008: 139). “implementasi kebijakan merupakan penerapan keputusan kebijakan dasar, umumnya dalam wujud

undang-undang tetapi bisa pula berupa perintah-perintah ataupun keputusan tubuh peradilan, lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi permasalahan yang mau diatasi, mengatakan secara tegas tujuan ataupun sasaran yang mau dicapai serta bermacam metode buat menstruktukan ataupun mengendalikan proses implementasi”.

Berdasarkan pendapat ketiga pakar di atas, diambil suatu kesimpulan bahwa yang diartikan dengan implementasi kebijakan adalah proses penerapan kebijakan dasar berbentuk undang-undang ataupun peraturan derivat dari undang-undang tersebut yang ditunjukkan buat menggapai tujuan-tujuan tertentu yang sudah diresmikan dalam keputusan kebijakan tersebut.

### **C. Model Implementasi Kebijakan**

Peter deLeon dan Linda deLeon (Nugroho, R. 2003) mengemukakan adanya pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, yang dikelompokkan menjadi tiga generasi yaitu generasi pertama pada tahun 1970-an, generasi kedua pada tahun 1980-an, dan generasi ketiga pada tahun 1990-an. Dua pendekatan yang biasa digunakan dalam implementasi kebijakan yang dikembangkan pada generasi kedua yaitu:

Pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas ke bawah” (*top-down perspective*). Pendekatan ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Implementasi kebijakan dilihat dari sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

- a. Pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “*bottom-upper*”. Bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat.

Ada beberapa model implementasi kebijakan yang menganut aliran *top-down* diantaranya adalah model implementasi kebijakan menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, George C Edwards III dan Merilee S. Grindle.

- 1) Model Van Metter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik, yaitu model yang diperkenalkan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn (1975). Model pendekatannya adalah *top-down* dan disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik (Agustino,L. 2008:141-142).

Implementasi merupakan proses yang dinamis, Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno membuat ikatan (*linkages*) yang dibentuk antara kebijakan dan kinerja. Menurut mereka tipe dan tingkatan sumber daya yang disediakan oleh keputusan kebijakan akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan komunikasi dan pelaksanaan. ( Budi,W. 2011: 158).

Kedua ahli tersebut mengemukakan (Wahab, 2008:78) bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan, yaitu:

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan;
- 2) Sumber-sumber kebijaksanaan;

- 3) Ciri-ciri atau sifat badan atau instansi pelaksana;
  - 4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
  - 5) Sikap para pelaksana;
  - 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politi.
- 2) Model George C Edward III

Model Yang dikembangkan oleh George C. Edward III menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation* dan *without effective implementation the decission of policymakers will not be carried out successfully*. Model implementasi ini berangkat dari sejumlah pertanyaan tentang prakondisi-prakondisi apa yang dapat membuat implementasi suatu kebijakan dapat berhasil. Selanjutnya dijawab oleh George C. Edward III (1980:9-10) yang menyatakan: “*In the next four chapter we shall attempt to answer these important questios by considering four critical factors or variables in implementing public policy : communication, resources, disposition or attitude and bureaucratic structure*”.

1) Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan dikomunikasikan dengan baik. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan pelaksana keputusan konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang akan diterapkan.

Ada tiga indikator dalam mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu:



- a) Transmisi, penyampaian komunikasi yang baik.
- b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan jelas dan tidak membingungkan.
- c) Konsistensi, perintah yang diberikan secara konsisten (tidak berubah-ubah) untuk dijalankan.

## 2) Sumberdaya

Menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan, indikator-indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Staf, dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan diperlukan jumlah staf yang mencukupi, didukung dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel)
- b) Informasi, dalam implementasi kebijakan terdapat dua bentuk informasi yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan yang telah ditetapkan.
- c) Wewenang, kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

## 3) Disposisi

Pelaksanaan kebijakan akan efektif, apabila para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus

memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Hal-hal yang penting dalam variabel disposisi adalah:

- a) Kecenderungan, keinginan dan kesepakatan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan ;
- b) Pengangkatan birokrat, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan;
- c) Insentif, salah satu teknik untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah memanipulasi insentif, dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu untuk membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

#### 4) Struktur birokrasi

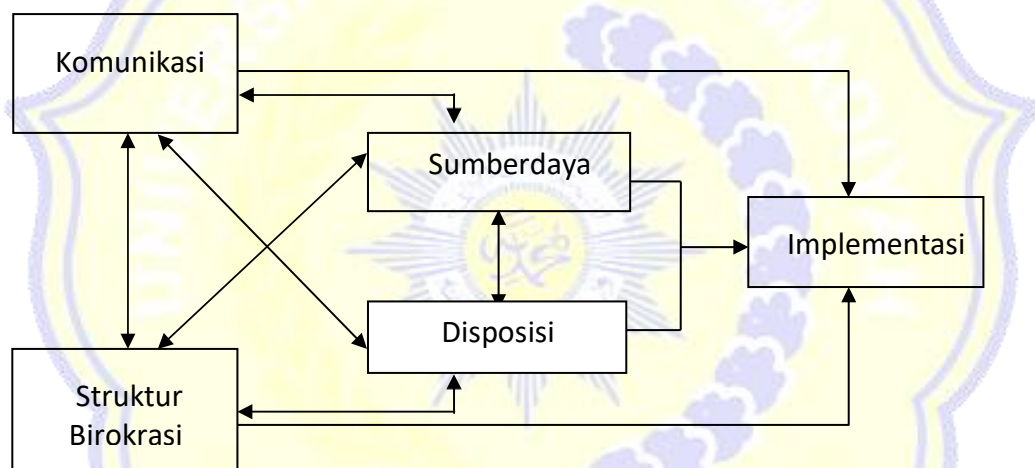
Dalam menjalankan suatu kebijakan, struktur birokrasi juga sangat mendukung akan berhasil atau tidak jalannya suatu kebijakan. Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka ini akan menyebabkan sumberdaya- sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Menurut George C. Edward III, dua karakteristik yang membuat kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik, adalah :

- a) *Standar Operating Procedured (SOP)*, suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- b) *Fragmentasi*, penyebaran tanggungjawab kegiatan diantara beberapa unit kerja. Rentang tugas dan tanggung jawab yang tersebar menjadikan jalur birokrasi menjadi panjang, sehingga menghambat implementor melaksanakan tugasnya. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape* yaitu prosedur birokrasi yang rumit.

Untuk menggambarkan konsep yang telah diberikan oleh George C. Edwards III, berikut ini adalah bagan kebijakan yang dimaksud:



**Gambar 1** : Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

### 3) Model Implementasi Ripley dan Franklin

Ripley dan Franklin dalam Subarsono (2005:89) menambahkan bahwa kompleksitas implementasi bukan saja ditujukan oleh aktor atau unit organisasi yang terlibat tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel individual maupun variabel organisasi; dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

Menurut Ripley dan Franklin (1982:232), bahwa untuk mengetahui keberhasilan suatu implementasi kebijakan maka dapat dilihat dengan tiga dimensi yaitu :

- (1) Kepatuhan.
- (2) Lancarnya rutinitas fungsi.
- (3) Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

#### **D. Definisi Kebijakan Pendidikan**

Istilah kebijakan pendidikan banyak dikonotasikan dengan istilah perencanaan pendidikan (educational planning), rencana induk tentang pendidikan (master plan of education), kebijakan pengaturan pendidikan (educational regulation), kebijakan tentang pendidikan (policy of education), serta istilah-istilah yang lain.

Tujuan utama dari ilmu kebijakan adalah untuk menentukan secara teknis serangkaian kegiatan yang terbaik untuk diadopsi agar dapat mengimplementasikan keputusan dan mencapai tujuan (Fatah, 2013: 133). Jadi ilmu kebijakan muncul sebagai kajian yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, misalnya masalah pendidikan.

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan sektor publik yang di dalamnya terdiri dari lembaga-lembaga yang menetapkan cara atau membuat justifikasi kegiatan melalui kekuasaan negara (Fatah, 2012: 132), sedangkan menurut Rohman (2001: 61), kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan

distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang terfokus pada permasalahan di bidang pendidikan.

Kebijakan pendidikan dipahami dalam dua makna, yaitu kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dan kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik atau dalam kebijakan publik. Pemahaman kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dapat digali dari ciri-ciri kebijakan publik. Adapun ciri-ciri kebijakan sebagai kebijakan publik menurut Tilaar dan Nugroho, (2008: 264-265) adalah kebijakan tersebut dibuat oleh negara, lembaga yang berkaitan dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang ditujukan untuk mengatur kehidupan bersama (kehidupan publik), mengatur masalah bersama, memberi manfaat bagi masyarakat dan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik karena bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik.

Kebijakan pendidikan berkenaan dengan pengaturan kehidupan sesama manusia. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi, (Tilaar dan Nugroho, 2008:16). Jadi, kebijakan pendidikan melalui tahapan proses analisis, perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

Kebijakan pendidikan merupakan keputusan yang berupa pedoman dalam bertindak, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan maupun program, serta rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan (Rohman, 2009: 119). Jadi keputusan kebijakan berisi pedoman dalam bertindak agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Rohman (2009: 119) menambahkan kebijakan pendidikan merupakan penjabaran visi-misi pendidikan yang dirumuskan dari pertimbangan pakar dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat, sehingga dalam komponen kebijakan mengandung tujuan, rencana, program, keputusan, serta dampak suatu kebijakan. Jadi kebijakan pendidikan yang baik tidak hanya berupa keputusan, namun juga harus memiliki tujuan, rencana dan program yang nyata untuk menyelesaikan permasalahan. Kebijakan pendidikan selalu didukung oleh riset dan pengembangan. Kebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak, tetapi kebijakan pendidikan tersebut dapat diimplementasikan. Suatu kebijakan pendidikan merupakan pilihan dari berbagai alternatif kebijakan, sehingga perlu dilihat output kebijakan tersebut dalam praktiknya (Tilaar dan Nugroho, 2008: 43). Jadi keputusan kebijakan yang dipilih didukung oleh hasil riset dan pengembangan agar dapat diimplementasikan dan keputusan tersebut merupakan pilihan terbaik dari alternatif kebijakan yang lain.

Kenyataannya, pendidikan adalah sebuah proses yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan berbagai aspek kehidupan, seperti aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya, maka suatu kebijakan pendidikan adalah suatu

kajian dari berbagai pakar (Tilaar dan Nugroho, 2008:43). Jadi kebijakan pendidikan disusun melibatkan berbagai pakar karena pendidikan merupakan sebuah proses yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat ditegaskan bahwa kebijakan pendidikan merupakan salah satu bagian dari kebijakan publik sektor pendidikan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan pendidikan merupakan sebuah keputusan yang menjadi pilihan utama dari alternatif- alternatif kebijakan lainnya yang dirasa paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan ataupun meningkatkan kualitas pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan pembukaan UUD 1945.

#### **E. Strategi Implementasi Kebijakan Pendidikan**

Fattah (2013:8) menjabarkan bahwa strategi merupakan cara atau pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penjaminan mutu dalam menilai kualitas proses (process quality) dan kualitas hasil (product quality). Strategi dapat mengacu pada isi (content) atau yang menjadi fokus, dan mengarah pada waktu pencapaian sasaran mutu atau target pencapaian standar nasional pendidikan: (a) strategi jangka pendek (selama 5 tahun), (b) strategi jangka panjang (selama 15 tahun).

Strategi merupakan seni untuk mengelola sumberdaya yang ada agar dapat mencapai sasaran yang dituju dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan penentuan suatu tujuan jangka panjang dari suatu lembaga dan aktivitas yang harus dilakukan guna mewujudkan tujuan tersebut, disertai alokasi sumber yang ada sehingga tujuan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien (Irene, 2011: 98).

Selanjutnya Zamroni (2013:16) menambahkan bahwa strategi merupakan seni untuk mengelola sumber daya yang ada agar dapat mencapai sasaran yang dituju dengan efektif dan efisien. Strategi tidak mudah untuk diubah sembarang waktu karena strategi bersifat mendasar dan menyeluruh. Strategi merupakan cara untuk melakukan sesuatu yang akan dicapai. Strategi dapat digunakan sebelum melakukan sesuatu agar hasil yang dicapai lebih maksimal dan efisien. Strategi berupa hasil dari pemikiran-pemikiran yang mengandung tujuan tentang aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Menurut kamus Webster, implementasi diartikan sebagai to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan dampak akibat terhadap sesuatu) (Rohman, 2009: 134). Sehingga pengertian di atas mengandung arti bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai proses menjalankan keputusan kebijakan. Wujud dari keputusan kebijakan ini biasanya berupa undang-undang, instruksi presiden, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya.

Grindle (Sudiyono, 2007: 77) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi berkaitan dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan suatu yang sangat penting, kemungkinan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan.



Menurut Van Meter dan Van Horn (Rohman, 2009:134), implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah di tentukan, yaitu tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan kedalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Grindle (Rohman, 2009: 134) menambahkan bahwa proses implementasi mencakup tugas-tugas membentuk suatu ikatan yang memungkinkan arah suatu kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Charles O. Jones (Rohman, 2009: 135), seorang ahli mendasarkan diri pada konsepsi aktivitas-aktivitas fungsional. Menurutnya, implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan sebuah program tersebut adalah: (1) Pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan; (2) Interpretasi, aktifitas menafsirkan program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan; (3) Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program (Rohman, 2009: 135). James E. Anderson (Sudiyono, 2007:81), mengemukakan implementasi kebijakan mencakup 4 aspek yaitu: (1) Personel yang terlibat implementasi kebijakan; (2)

esensi proses administratif; (3) Kepatuhan terhadap kebijakan; (4) Pengaruh implementasi pada isi dan dampak kebijakan.

Berdasar beberapa terori atau penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi implementasi kebijakan merupakan cara untuk mengelola sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan yang berasal dari individu atau kelompok pemerintah yang berupa keputusan kebijakan agar kebijakan tersebut dapat terealisasikan atau terlaksana untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.

#### **F. Mutu Pendidikan**

Definisi mutu menurut Arcaro (2007) adalah sebuah derajat variasi yang terduga standar yang digunakan dan memiliki ketergantungan pada biaya yang rendah. Dalam konteks mutu pendidikan, konsep mutu adalah elite karena hanya sedikit instistusi yang memberikan pengalaman dengan mutu tinggi kepada peserta didik (Zazin, 2011: 54-55).

Dr. Joseph M. Juran pun diakui sebagai salah satu “Bapak Mutu”. Seperti halnya Deming, Juran menyebut mutu sebagai “tepat untuk pakai” dan menegaskan dasar misi mutu sebuah sekolah adalah mengembangkan program dan layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna seperti siswa dan masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa “tepat untuk dipakai” lebih tepat ditentukan oleh pemakai bukan oleh pemberi (Arcaro, 2007: 8) Beberapa pandangan Juran tentang mutu yaitu: (a) Meraih mutu ,merupakan proses yang tidak mengenal akhir; (b) Perbaikan mutu merupakan proses yang berkesinambungan; (c) Mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota dewan

sekolah dan admimistrator; (d) Pelatihan massal merupakan prasyarat mutu; (e) Setiap orang di sekolah (warga sekolah) mesti mendapatkan pelatihan.

Danim (2006: 53) mengungkapkan bahwa mutu dalam pendidikan mengacu pada masukan, proses dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, kondisi sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboratorium, staf tata usaha dan siawa. Kedua, terpenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah dan lain-lain. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita.

Hasil pendidikan dikatakan bermutu jika dapat menghasilkan keunggulan dibidang akademik dan non akademik untukn siswa yang dapat menyelesaikan/ lulus jenjang pendidikan tertentu. Dalam bidang akademik dinyatakan dengan nilai yang berhasil diperoleh peserta didik, dalam bidang ekstrakurikuler dinyatakan dengan berbagai jenis ketrampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti progam ekstrakurikuler. Mutu luaran dapat dilihat dari nilai-nilai yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju dan lain-lain yang diperoleh siswa selama di sekolah (Danim 2006: 53-54).

Mutu sebuah sekolah juga dapat dilihat dari tertib administrasinya seperti mekanisme kerja yang efektif dan efisien, baik secara vertical maupun horizontal. MBS dikatakan bermutu jika sumber daya manusianya bekerja secara efektif dan

efisien. Proses pekerjaan dimulai dari awal, bukan mengatasi masalah yang rutin timbul karena kesalahan tidak sengaja (Danim, 2006: 54).

Mutu dalam pendidikan meliputi input, proses, dan output. Input dikatakan bermutu siap berproses sesuai standar minimal nasional dalam pendidikan. Proses pendidikan dinyatakan bermutu apabila mampu menciptakan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Output dikatakan bermutu apabila siswa dapat mencapai hasil belajar yang tinggi baik dibidang akademik maupun non akademik (Mutohar, 2013: 135).

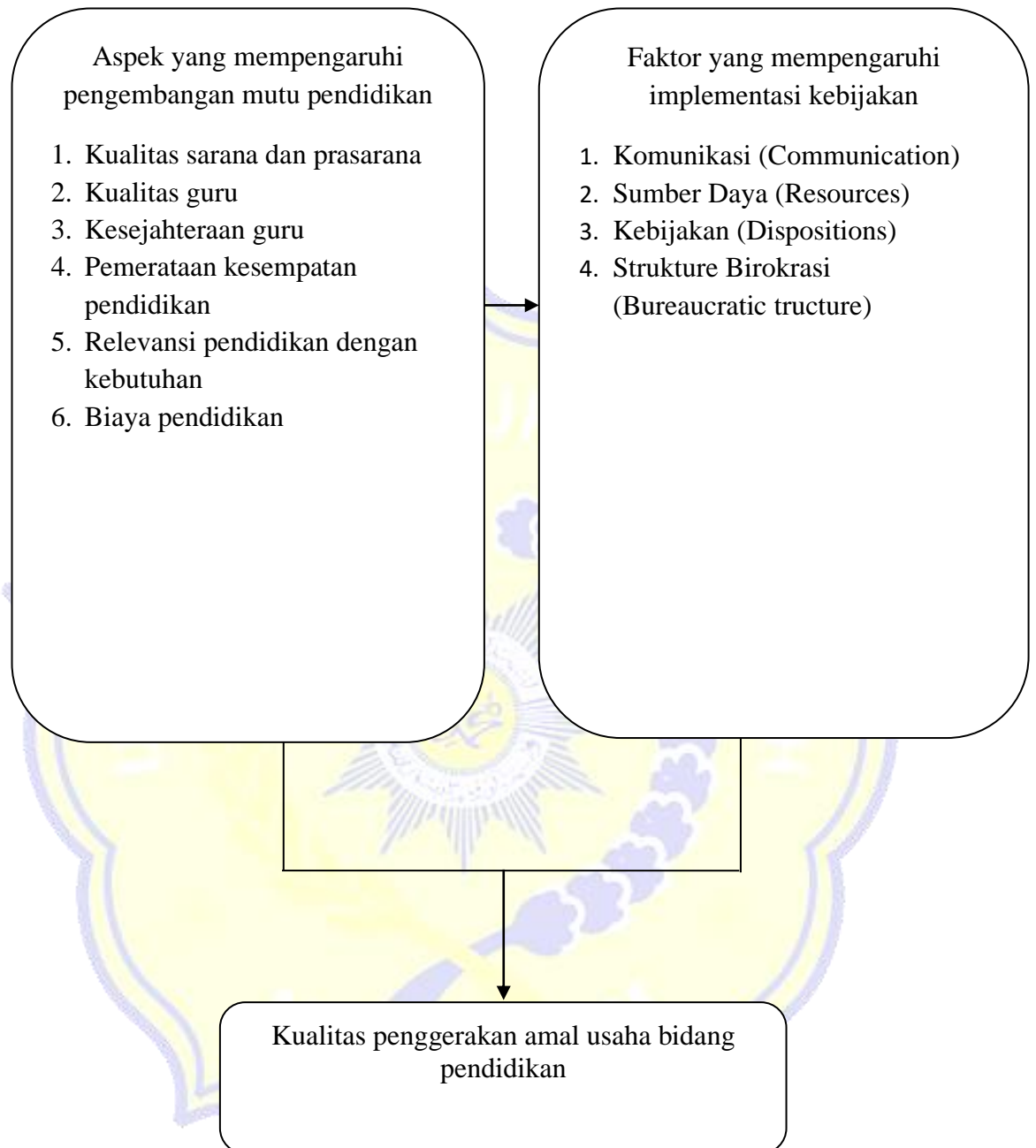
#### **G. Faktor-faktor pengembangan mutu pendidikan**

Berdasarkan Jatikom (Ida, dkk. 2019: 167) mutu pendidikan di Indonesia dipengaruhi beberapa aspek antara lain, yaitu: 1) kualitas sarana; 2) kualitas guru; 3) kesejahteraan guru; 4) pemerataan kesempatan pendidikan; 5) relevansi pendidikan dengan kebutuhan; dan 6) biaya pendidikan. Dapat dijelaskan rendahnya kualitas sarana dapat menghambat proses pembelajaran pesertadidik, sehingga berdampak pada mutu pendidikan yang dihasilkannya. Misalnya sekolah memiliki gedung yang rusak, buku perpustakaan yang tidak lengkap, dan prasarana yang tidak sesuai standar, permasalahan tersebut dapat menghambat proses peningkatan mutu pendidikan. Kemudian kualitas guru atau pendidik merupakan cerminan kualitas dari mutu pendidikan. Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, namun pendidik memberikan andil besar pada kualitas pendidikan. Kesejahteraan guru merupakan hal yang mampu mempengaruhi tingkat kualitas guru. Rendahnya kesejahteraan guru

berdampak pada kualitas guru yang rendah, bila kesejahteraan guru pada taraf yang ideal maka memberikan dampak pada kualitas guru yang bagus.



## H. Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang secara aktif dalam pengumpulan data, yaitu secara langsung menemui institusi tempat penelitian. Dalam konteks ini peneliti menggambarkan Implementasi Kebijakan Pengembangan Amal Usaha Bidang Pendidikan Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Mataram.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Muhammadiyah Mataram, hal ini dikarenakan SMA Muhammadiyah sebagai salah satu amal usaha di bawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Mataram dan sebagai tempat terlaksananya kebijakan-kebijakan yang telah disusun. Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember tahun 2021 di SMA, SMK dan SMP Muhammadiyah Mataram yang sebagai amal usaha bidang pendidikan di bawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Mataram.

#### **C. Pemilihan informan**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi dari Edward III. Informan dibagi menjadi tiga, yaitu informan ahli, informan kunci, dan informan pendukung. Adapun informan ini ditentukan dengan snowball sampling, yaitu pengambilan sampel sumber data yang didapatkan dari orang pertama yang kemudian menyebar menjadi jumlah sample yang semakin banyak.

Dalam hal ini peneliti, pihak yang akan di jadikan narasumber salah satunya pengelola program kebijakan pemerintah serta pihak lain yang dianggap terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan data primer dan sekunder.

#### **D. Sumber dan Jenis Data**

Menurut moleong (2006) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengalaman lain, data tambahan dari sumber tertulis seperti dokumen resmi, sumber arsip, majalah ilmiah, dokumen tertulis resmi, dan termasuk studi pustaka. Berkaitan dengan ini peneliti menggunakan data sebagai berikut :

##### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden. Disamping menggunakan penelitian yang berkaitan mengadakan wawancara dengan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan persoalan penelitian sehingga memperoleh informasi yang mendalam. Peneliti melakukan wawancara sesuai panduan wawancara yang sudah disiapkan.

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, melainkan melalui dokumen-dokumen atau catatan tertulis. data yang tertulis yang bersumber dari data dokumen-dokumen disebut dokumenter, yaitu data berupa gambaran tentang lokasi penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengembangan amal usaha bidang pendidikan Pimpinan Muhammadiyah Kota Mataram.



## **E. Teknik pengumpulan data**

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data dalam penelitian diperoleh dengan tiga cara yaitu :

### **a. Wawancara**

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan sumber-sumber yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti, sehingga memperoleh data dan informasi terkait tentang pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan amal usaha bidang pendidikan Pimpinan Muhammadiyah Kota Mataram.

### **b. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati atau melihat peristiwa yang timbul, berkaitan dengan apa yang diteliti secara langsung yang sesuai dengan yang diteliti sehingga menemukan apa yang menjadi pokok permasalahannya.

### **c. Dokumentasi**

Untuk memperoleh data-data yang diteliti, dalam teknik ini peneliti melakukan dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan amal usaha bidang pendidikan Pimpinan Muhammadiyah Kota Mataram, foto kegiatan kebijakan pemerintah dan apa saja yang terkait dengan permasalahan tersebut.

## **F. Teknik analisa data**

Analisis data dilakukan peneliti yaitu dengan mengorganisasikan data , menyusun ke dalam pola yang sudah ditentukan, memilih yang penting yang akan dipelajari dibuktikan dengan data yang diperoleh lapangan ketika melakukan

wawancara dan observasi dilapangan sesuai kebutuhan. Peneliti menjelaskan dan menguraikan data yang diperoleh sehingga dapat ditarik kesimpulan dan saran untuk menjawab semua permasalahannya.

### **G. Uji Validitas Data**

Dalam Sugiyono (2015:121-131). Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Namun pada kali ini peneliti menggunakan uji kredibilitas.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan berbagai kegiatan, disini peneliti hanya menggunakan kegiatan trigulasi. Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai narasumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

#### **a. Analisis Kasus Negatif**

*Kasus* negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis *kasus* negative berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan, tetapi jika peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan temuan maka peneliti akan merubah temuannya.

#### **b. Menggunakan Bahan Referensi**

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Seperti photo-photo, alat perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti camera, handphone, alat

perekam suara sangat diperlukan untuk mendukung keabsahan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

c. Member check

*Member check* adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan *Member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan.

